

**UPAYA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI MENGOPTIMALKAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SMP NEGERI DI KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2015**

Oleh :

Andri Yandy

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Phone / Fax : +62 (0)761 , 63277

Website : <http://fisip.unri.ac.id>

Abstract

BOS program aims to alleviate the burden on society in order to finance education compulsory 9 years of quality. Channeling of BOS Funds for 2015 performed 3 (three) months or four (4) times a year

The research problems are how the efforts of the Department of Education Dumai optimize School Operational Assistance junior level State in Sungai Sembilan Kota Dumai 2015 and what are the factors inhibiting the City Department of Education Dumai in optimizing the School Operational Assistance junior level State in Sungai Sembilan Kota Dumai 2015. the purpose of this study was to determine the Dumai City Department of Education effort to optimize the School Operational assistance level in Sungai SMP Negeri Sembilan Kota Dumai year 2015 and to determine the factors inhibiting Dumai City Department of Education in order to optimize the School Operational assistance level in Sungai SMP Negeri Sembilan Kota Dumai 2015.

This research was conducted at the Sungai Sembilan Kota Dumai. The method used is a qualitative research, data collection techniques are interviews, observation and documentation

Based on the survey results revealed that efforts to optimize Dumai City Department of Education School Operational Assistance level in Sungai SMP Negeri Sembilan Kota Dumai 2015 in the implementation of distribution, data collection, monitoring is still considered weak. The scarcity of regular meetings and pertmuan done periodically to certain officials. Factors inhibiting the City Department of Education Dumai in optimizing the School Operational Assistance junior level State in Sungai Sembilan Kota Dumai 2015 are: 1) internal factors, namely, the school does not have specialized personnel in the field of administration to menangai BOS program, disbursements Bos seem complicated, because many the administration must be completed, 2) external factors, namely, the network is often busy and cause the server to die, difficult for schools to raise money for community participation.

Keywords: Dumai City Department of Education, the School Operational Assistance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan di bidang pendidikan adalah sekolah gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan, satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan, satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.¹

Sedangkan Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:²

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan

jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:³

1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terdapat 4 (empat) SMP Negeri yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Dalam penelitian ini penulis menetapkan 2 (dua) SMP Negeri yang ada di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu SMP Negeri 6 Dumai dan SMP Negeri 69 Dumai.

Penyaluran Dana BOS untuk tahun 2015 dilakukan 3 (tiga) bulan sekali atau 4 (empat) kali dalam setahun. Namun kenyataan dilapangan, ditemukan ada beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan, pendataan, maupun penyaluran dana BOS. Bahwa ada beberapa hasil rekapitulasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai, khususnya data yang diusulkan oleh SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 9 Kecamatan Sungai Sembilan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak komite sekolah dan dewan guru di SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, ternyata mereka sama sekali tidak mengetahui akan penggunaan dana BOS tersebut disekolah. Bendahara BOS yang ditunjuk Kepala Sekolah sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS disekolah hanya diminta tanda tangannya untuk mengambil dan mencairkan dana. Mereka tidak mengetahui berapa sebenarnya besar dana yang diperoleh dan berapa sebenarnya besar dana yang digunakan untuk biaya operasional sekolah. Yang mereka tahu hanya, bahwa siswa sudah dibebaskan dari berbagai macam bentuk iuran sekolah. Meskipun mereka tahu bukan itu saja kegunaan dari dana BOS tersebut.

Dari sejumlah penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh indikasi adanya gejala-gejala/fenomena terkait dalam penyaluran dana BOS, adapun gejala/fenomena tersebut adalah:

¹Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, hal 3

² Ibid, hal 3

³ Ibid, hal 3

1. Kurangnya kemampuan pihak sekolah mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) dengan menggunakan media internet, karena selama ini pihak Dinas Pendidikan Kota Dumai tidak melatih, membimbing dan mendorong pihak sekolah.
2. Adanya perbedaan jumlah data siswa penerima Dana BOS antara SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 9 Sungai Sembilan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Dumai dimana terdapat perbedaan selisih perbedaan jumlah siswa yang tentunya akan berpengaruh pada jumlah cucuran dana yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat.
3. Pihak komite sekolah dan dewan guru tidak mengetahui akan penggunaan dana BOS tersebut disekolah. Bendahara BOS yang bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS disekolah hanya diminta tanda tangannya untuk mengambil dan mencairkan dana. Padahal di dalam ketentuan buku pedoman BOS telah ditegaskan bahwa penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015 ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam

mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja melalui konsiliasi pada PT. Jarsindo Karya Utama di Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- b. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah.

D. Kerangka Teori

1. Manajemen Pemerintahan Daerah

Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup⁴:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Terselenggaranya *good governance*

⁴ Sedarmayanti. 2004. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama, hlm 9

merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme⁵.

2. Peranan

Kata peranan mencakup sedikit tiga pengertian dalam Sosiologi antara lain⁶:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkayan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan di artikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan⁷. Menurut Astrid S. Susanto dengan adanya pretise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.⁸

Menurut Gross et.all, mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat

dikatakan bahwa peranan itu di tentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat⁹.

E. Kerangka Konseptual

Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
- b. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- c. Tim PKPS-BBM / Tim Manajemen BOS adalah Tim panitia gabungan yang mengelola dan mengurus Dana BOS di Propinsi/Kabupaten/sekolah demi kelancaran penyaluran dana BOS.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini di identifikasikan sebagai penelitian deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tepatnya di Dinas Pendidikan Kota Dumai.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang dianggap memahami betul dan dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan masalah peneliti. Dengan teknik pengambilan informan secara *purposive*. Teknik *purposiv* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kondisi politik

⁵ *Ibid*, hlm 12

⁶ Soerjono Soekanto, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 269

⁷ Taliziduhu Ndraha, Op Cit, hlm 53

⁸ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 91

⁹ Berry, David, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 105.

disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik¹⁰.

Untuk lebih jelasnya informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	H. Sya'ari	Kadis Pendidikan	1 orang
2	Mangarahon Rame	Kepsek SMPN 9	1 orang
3	Zulkifli	Kepsek SMPN 6	1 orang
4	Yannuar, Yenni Gurning	Guru SMPN 9	2 orang
5	Rogayah Hasan, Candra Iswandi	Guru SMPN 6	2 orang
6	M. Rozali	Ketua Komite SMPN 9	1 orang
7	Muhammad	Ketua Komite SMPN 9	1 orang
8	Edison	Anggota DPRD Komisi C	1 orang
9	Yustina	Pemerhati Pendidikan	1 orang
10	Hasrizal	Dewan Pendidikan	1 orang
Jumlah			12 orang

Sumber: Data Olahan, 2015.

2. Telaah data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi

¹⁰ Sugiyono, *Op Cit*, hlm 85.

dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji¹¹. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran umum Kota Dumai, gambaran umum Kecamatan Sungai Sembilan, gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Duma, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Dumai dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Dumai

4). Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data Primer. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden¹². Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, upaya dan hambatan Dinas Pendidikan Kota Dumai mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015.
- Data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi¹³. Data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - Gambaran Umum Kota Dumai.
 - Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Dumai.
 - Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Dumai.
 - Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Dumai

5). Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Op Cit*, hlm 225.

¹² Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta, hlm 252

¹³ Sugiyono, *Op Cit*, hlm 225

- a. Wawancara.
- b. Observasi.
- c. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi

6). Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan dan kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Menurut Iskandar, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul¹⁴.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Geografis

Kota terletak di di Provinsi Riau, Kota Dumai ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Mandau, Bengkalis dan Bukit Batu, Bengkalis
- Sebelah Barat : Bangko, Rokan Hilir dan Tanah Putih, Rokan Hilir
- Sebelah Timur : Bukit Batu, Bengkalis

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Timur seluas 1.772,38 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 173.188 jiwa.

2. Proses Penetapan Alokasi Dana BOS

Penetapan alokasi BOS di tiap provinsi untuk keperluan anggaran dan

alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dan penyaluran dana adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai langkah awal, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan kontrol/verifikasi terhadap data jumlah peserta didik tiap sekolah yang ada di Dapodik berdasarkan data yang ada. Apabila terdapat perbedaan, maka Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota harus mengonfirmasi perbedaan tersebut kepada sekolah, agar data yang ada pada Dapodik sesuai dengan data riil yang ada di sekolah;
- b. Pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim
- c. Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah yang ada pada Dapodik sebagai persiapan pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun anggaran mendatang;
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik untuk membuat usulan alokasi dana BOS tiap Provinsi yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan;
- e. Alokasi BOS tiap provinsi tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada di Dapodik pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru;
- f. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi BOS tiap provinsi melalui Peraturan Presiden sesuai dengan usulan dari Kementerian Pendidikan dan

¹⁴ Iskandar, *Op Cit*, 100

- Kebudayaan mengenai jumlah peserta didik dan alokasi dana BOS di tiap provinsi;
- g. Untuk penetapan alokasi BOS di tiap sekolah, Kemdikbud mendasarkan perhitungan pada data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada pada Dapodik. Oleh karena itu, sekolah yang tidak mengisi Dapodik (tidak tercantum dalam *data base* sistem Dapodik) secara otomatis tidak mendapat alokasi dana BOS;
 - h. Untuk menghindari kejadian tersebut, sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodik harus segera berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, Tim Dapodik Kabupaten/Kota dan Tim Dapodik Pusat.
 - i. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2015 didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2014-2015, sedangkan periode Juli-Desember 2013 didasarkan pada data tahun pelajaran 2015-2016.
 - k. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan didasarkan data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Nopember 2014;
 2. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Februari 2015;
 3. Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Mei 2015;
 4. Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada

Dapodik tanggal 21 September 2015;

1. Ketentuan penetapan alokasi BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan adalah sebagai berikut:
 1. Sekolah yang mendapatkan alokasi BOS adalah sekolah yang sudah tercantum dalam *data base* Dapodik saat pengambilan data sebelum penyaluran dana BOS di awal triwulan. Besar dana BOS sekolah sesuai dengan data jumlah peserta didik yang ada pada Dapodik saat pengambilan data (tergantung pula pada kebijakan alokasi yang berlaku terkait jumlah peserta didik di sekolah);

3. Penyaluran Dana BOS

Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Triwulan Pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari 2015;
2. Triwulan Kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2015;
3. Triwulan Ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015;
4. Triwulan Keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.

Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari RKUN ke RKUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester Pertama (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di Januari 2015;
2. Semester Kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015.

B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Dumai

1. Sejarah Dinas Pendidikan Kota Dumai

Pada awal berdirinya, dinas Pendidikan Kota Dumai terdiri dari dua instansi atau organisasi yang pertama adalah Dinas P & K (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yaitu Dinas yang khusus mengurus bidang pendidikan untuk Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang ada di Kota Dumai. Kemudian yang kedua adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disingkat dengan DEPDIKBUD, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini khusus mengurus bidang pendidikan untuk tingkat SMP dan SMA. Kemudian setelah diberlakukan otonomi daerah di Kota Dumai maka kedua instansi pemerintahan ini digabung hingga diubah namanya menjadi Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Dumai merupakan salah satu Dinas yang ada dalam susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Dumai yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pendidikan di Kota Dumai. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang telah melekat pada pemerintah Kota Dumai. Oleh karena itu maka kemajuan pemerintah Kota Dumai sangat tergantung kepada komitmen pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada, termasuk potensi sumber daya manusia (SDM).

Untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Dumai diupayakan menjadi dinas yang kuat dan tangguh dalam mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Dinas Pendidikan Kota Dumai berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kota yang diserahkan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Dumai.

A. Upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015.

Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk mengelola dana BOS di tingkat sekolah adalah: a) Penanggungjawab yang terdiri dari Kepala Sekolah; b) Anggota yang terdiri dari bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:¹⁵

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) triwulan Pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari 2015, triwulan Kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2015, triwulan Ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015, triwulan Keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:¹⁶

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Sya'ari selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, tanggal 17 Mei 2016

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:¹⁷

Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan pengelolaan dana BOS didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Guru SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:¹⁸

Dana BOS juga dapat digunakan untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri maksimal sebesar 15% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 melarang penggunaan dana sebagai berikut: (1) Disimpan dengan maksud dibungkakan; (2) Dipinjamkan kepada pihak lain; (3) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS; (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; (5) Membayar

iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; (6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; (7) Membeli seragam bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk peserta didik penerima BSM; (8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; (9) Membangun gedung baru; (10) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) yang tidak mendukung proses pembelajaran; (11) Menanamkan saham; (12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah; (13) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah; (14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti sosialisasi terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai penggunaan BOS, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya dalam menggunakan dana BOS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, utamanya untuk kegiatan operasional sekolah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:¹⁹

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Selain melibatkan dewan guru dan komite sekolah, dalam pelaksanaan program BOS di sekolah terdapat tim manajemen sekolah. Tim manajemen sekolah yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Candra Iswandi selaku guru SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Sya'ari selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, tanggal 17 Mei 2016

Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:²⁰

Dalam penyaluran BOS, dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Dumai dengan memberikan informasi kepada sekolah. Kemudian sekolah yang ingin memperoleh dana BOS tersebut harus melakukan pendataan jumlah siswa mereka untuk selanjutnya diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Data yang diperoleh Dinas Pendidikan Kota Dumai kemudian akan diproses dan direkapitulasi. Hasil rekap tersebut kemudian akan diteruskan ke Tim PKPS-BBM Provinsi.

Berikut ini adalah upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015.

1. Rapat Rutin

Rapat rutin merupakan pertemuan yang dilakukan secara terus menerus guna membahas kendala-kendala yang terjadi untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam penyaluran dana BOS di sekolah-sekolah. Melihat rapat rutin merupakan suatu aktivitas dalam mengulas kesalahan ataupun kekurangan baik dalam pendataan, penyaluran, maupun penggunaan dana BOS kepada sekolah. Disamping itu rapat rutin yang ada akan selalu memberikan masukan-masukan dalam menjalankan aktivitas penyaluran dana BOS tersebut.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Guru SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:²¹

Dalam rapat rutin tersebut hanya membahas masalah kelebihan dan kekurangan sekolah setelah mendapat

dana BOS. Dan terkadang Kepala Sekolah hadir hanya untuk menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan. Bukan memberikan informasi tentang pelaksanaan pendataan dan penyaluran serta laporan kepala sekolah atas penggunaan dana tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat melihat bahwa rapat rutin hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah tanpa sepengetahuan dewan guru yang harus terlibat didalamnya, selain itu rapat rutin ini dinilai lemah karena rapat tersebut hanya membahas kelebihan dan kekurangan sekolah setelah mendapat dana BOS, bukan memberi informasi tentang pelaksanaan pendataan dan penyaluran laporan kepala sekolah atas penggunaan dana tersebut.

2. Pertemuan-pertemuan berkala untuk pejabat tertentu

Pertemuan berkala yang melibatkan Kepala Sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan tentunya sangat perlu guna melakukan evaluasi dan membahas kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS. Melihat pertemuan berkala untuk pejabat tertentu merupakan suatu aktifitas dalam mengulas kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS. Selain itu, pertemuan berkala tersebut akan memberikan masukan-masukan dalam menjalankan aktifitas penyaluran dana BOS.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:²²

Kepala sekolah memang terkadang terlibat dalam pertemuan berkala yang dimaksud, namun sedikit sekali dari pejabat-pejabat Dinas Pendidikan yang terlibat dalam pertemuan tersebut.

²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Sya'ari selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, tanggal 17 Mei 2016

²¹ Wawancara dengan Bapak Candra Iswandi selaku guru SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

²² Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

Menurut hasil wawancara penulis dengan Guru SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:²³

Terkadang hanya tim pelaksana saja yang menghadiri pertemuan tersebut tanpa di hadiri oleh pejabat dinas yang ada. Selain itu pertemuan yang diharapkan bisa melakukan evaluasi baik masalah pendataan maupun penggunaan dana dan mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi, namun dalam kenyataannya berbeda. Secara umum, hanya perkembangan sekolah yang di bahas dalam pertemuan tersebut.

3. Pengawasan

Prioritasnya utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap sekolah penerima dana BOS. Pengawasan penggunaan dana BOS melalui tiga bentuk yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai kewenangan masing-masing. Pertama, monitoring. Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring eksternal dilakukan oleh Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional dan atau lembaga independen yang profesional untuk itu, misalnya Bank Dunia.

Kedua, pengawasan melekat, yaitu dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi pada bawahannya baik di pusat, provinsi, dan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengawasan fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan Masyarakat dilakukan unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah dan hasil pengawasan tersebut harus disampaikan

kepada pihak berwenang. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Menyediakan Buku pedoman organisasi tentang pelaksanaan penyaluran dana BOS

Buku pedoman organisasi merupakan buku yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas, tata kerja serta berupa petunjuk pelaksana, demi tercapainya komunikasi yang baik sehingga koordinasi diharapkan dapat berjalan dengan baik pula. Mengenai program BOS, pemerintah pusat telah menerbitkan buku panduan yang berisikan keterangan lengkap tentang BOS serta teknis pelaksanaannya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, diperoleh informasi bahwa:²⁴

Tidak semua sekolah berpedoman pada buku panduan karena mereka tidak mengerti dan memahami akan apa yang diterangkan dalam buku tersebut. Pihak sekolah lebih memilih untuk bertanya kepada teman atau menunggu perintah dari atasan dari pada membaca ataupun memahami isi buku panduan tersebut.

5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

RKAS disusun pada waktu awal tahun pelajaran, dalam penyusunan RKAS berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Isi RKAS menyangkut 8 aspek SNP. Dan dalam RKAS terdapat sumber dana serta pemakaiannya untuk kebutuhan sekolah

Penyusunan RKAS diawali dengan rapat dewan guru di awal tahun pelajaran, guru kelas, guru mapel dan tenaga pendidik lainnya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, setelah itu pendapatnya ditampung oleh kepala sekolah dan akhirnya dibentuklah suatu kesepakatan dan kalau RKAS sudah jadi, barulah ditandatangani oleh ketua komite. Tujuan penyusunan

²³ Wawancara dengan Bapak Yannuar selaku guru SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

²⁴ Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

RKAS, sebagai pedoman dalam mengelola uang BOS agar sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengenai apakah sekolah membuat RKAS, diperoleh informasi bahwa:²⁵

RKAS dibuat dua kali diawal tahun pelajaran dan membuat lagi RKAS perubahan di semester II.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengenai apakah sekolah membuat RKAS, diperoleh informasi bahwa:²⁶

RKAS dibuat 2 kali mba di awal tahun pelajaran dan di akhir semester I.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengenai bagaimana kelengkapan isi dari RKAS, diperoleh informasi bahwa:²⁷

Isi RKAS ada sumber dana yang diterima sekolah, kemudian ada berbagai macam kegiatan peserta didik yang didanai oleh BOS, dan dalam RKAS juga memuat program-program sekolah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengenai bagaimana kelengkapan isi dari RKAS, diperoleh informasi bahwa:²⁸

Didalam RKAS menjabarkan kegiatan sekolah yang dirinci ke 8 SNP. Selain itu terdapat juga sumber dana yang diterima sekolah.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

²⁶ Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

²⁷ Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

²⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengenai bagaimana proses penyusunan RKAS, diperoleh informasi bahwa:²⁹

RKAS disusun bersama dengan dewan guru, penyusunannya diawali dengan evaluasi diri sekolah, kemudian guru menyampaikan kebutuhan kelas masing-masing, dan akhirnya diperoleh kesepakatan untuk memilih skala kebutuhan yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang rutin dan mendesak. Setelah RKAS jadi, kemudian komite mengesahkan dan menyetujui RKAS setelah itu tinggal tanda tangan.

6. Pelatihan Pelaksanaan Program BOS

Pada tahun 2015 pelatihan dilakukan sebanyak 1 kali. Pelatihan tingkat kecamatan di UPK. Untuk pengisi materinya adalah kepala UPK, pengawas, dan kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan di tingkat Kabupaten. Materi sosialisasi terkait sosialisasi kebijakan BOS baru, pelaporan, SPJ dan kelengkapan administrasi. Sekolah mengirimkan 2 wakilnya ke UPK untuk mengikuti pelatihan yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengenai apakah sekolah sudah mengikuti pelatihan pelaksanaan program BOS 2015 yang diselenggarakan oleh tim manajemen BOS Kabupaten, diperoleh informasi bahwa:³⁰

Pelatihan di UPK, yang berangkat kepala sekolah. Materinya berkaitan dengan kebijakan BOS yang baru, SPJ, dan perpajakan, untuk yang mengisi ada pengawas kepala UPK dan kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan di Kabupaten.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

³⁰ Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengenai apakah sekolah sudah mengikuti pelatihan pelaksanaan program BOS 2015 yang diselenggarakan oleh tim manajemen BOS Kabupaten diperoleh informasi bahwa:³¹

Pelatihan di UPK, yang mengikuti sosialisasi kepala sekolah dan bendahara sekolah, pengisinya dari kepala UPK, pengawas, dan kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan di Kabupaten. Isi materi tentang kebijakan BOS baru, SPJ, dan perpajakan.

Peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dana BOS seharusnya melibatkan beberapa pihak yang berkopetensi di dalamnya, untuk menciptakan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait harus adanya interaksi di kedua belah pihak demi membahas kendala yang terjadi di lapangan, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh bawahan yakni sekolah dapat dilakukan dengan memakai bahasa/tulisan yang akan menunjang kegiatan penyaluran dana BOS oleh Dinas Pendidikan dengan sekolah. Oleh sebab itu pesan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan ke pihak penerima bantuan haruslah jelas, baik masalah bagaimana proses penyaluran dana, pelaporan penggunaan haruslah jelas oleh pihak penerima agar di kemudian hari dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

B. Faktor Penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai Dalam Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015.

Terdapat 2 faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015

yaitu internal dan eksternal, untuk lebih jelasnya faktor penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Internal

1. Sekolah tidak memiliki tenaga khusus di bidang administrasi untuk menangani program BOS.

Administrasi penyaluran dana Bos dilakukan oleh kepala sekolah atau guru yang ditunjuk, sehingga kepala sekolah dan guru tidak dapat fokus pada tugas masing-masing. Tenaga khusus di bidang administrasi untuk menangani program BOS menurut penulis pendidikan S1 Akuntansi, mempunyai sertifikat komputer, dan juga harus Pegawai Negeri Sipil.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai mengenai pihak lain yang secara khusus menangani pengelolaan dana BOS, diperoleh informasi bahwa :³²

Tidak ada pihak lain yang secara khusus menangani pengelolaan dana BOS, pengelolaan dana BOS dilakukan oleh sekolah. Administrasi BOS sangatlah banyak dan rumit belum lagi pelaporannya, karena itu, harusnya ada bagian administrasi yang ditugaskan untuk mengelola program BOS di SMP. Biasanya guru muda yang masih fresh dan ahli di bidang operator, tapi sayangnya yang mengelola program BOS haruslah PNS.

2. Penyaluran dana Bos terkesan dipersulit, karena banyaknya administrasi yang harus dilengkapi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, mengenai faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan

³¹ Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

³² Wawancara dengan Bapak Mangarahon Rambe selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tanggal 18 Mei 2016

Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015 diperoleh informasi bahwa:³³

Administrasi BOS yang sangat banyak apalagi SPJ, pelaporan, dan perpajakannya. Kebanyakan pihak sekolah kurang mengetahui cara mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) dengan menggunakan media internet. Tapi solusi disini itu yang jadi bendahara BOS bergilir, dan yang menjadi bendahara harus PNS. Pengoperasian komputer biasanya dibantu guru muda.

2. Eksternal.

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015, yaitu:

1. Administrasi dana Bos berbasis internet, permasalahannya jaringan sering sibuk dan menyebabkan server mati sehingga respon sistem dalam menghasilkan informasi agak terganggu.
2. Ketentuan sekolah gratis menyulitkan sekolah untuk menggalang dana partisipasi masyarakat meskipun dalam panduan diperbolehkan adanya partisipasi masyarakat berbentuk sumbangan sukarela.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai mengoptimalkan Bantuan Operasional

Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015 dalam pelaksanaan penyaluran, pendataan, pengawasan masih dinilai lemah. Jarangnya dilakukan rapat rutin dan pertemuan berkala untuk pejabat tertentu menggambarkan upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai mengoptimalkan Bantuan Operasional dinilai kurang terlaksana dengan baik. Meskipun terdapat buku pedoman, namun tidak semua dari penyelenggara BOS berpedoman pada buku tersebut. Keterlibatan dewan guru dalam penyusunan RKAS sangatlah aktif, untuk peran komite sekolah sendiri masih kurang, karena komite sekolah hanya menyetujui dan menandatangani RKAS serta berperan pada masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah.

2. Faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015 adalah: 1) faktor internal yaitu, sekolah tidak memiliki tenaga khusus dibidang administrasi untuk menangani program BOS, penyaluran dana Bos terkesan dipersulit, karena banyaknya administrasi yang harus dilengkapi, 2) faktor eksternal yaitu, administrasi dana Bos berbasis internet, permasalahannya jaringan sering sibuk dan menyebabkan server mati sehingga respon sistem dalam menghasilkan informasi agak terganggu, ketentuan sekolah gratis menyulitkan sekolah untuk menggalang dana partisipasi masyarakat meskipun dalam panduan diperbolehkan adanya partisipasi masyarakat berbentuk sumbangan sukarela.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak sekolah perlu memiliki tenaga khusus di bidang administrasi untuk menangani program BOS.

³³ Wawancara dengan Bapak H. Sya'ari selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, tanggal 17 Mei 2016

2. Peran serta komite sekolah sangatlah penting, oleh karena itu disarankan agar komite sekolah lebih berperan aktif dalam penyusunan RKAS.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembuat kebijakan dan penyusun standar operasional program perlu melakukan kajian yang berkelanjutan tentang kebutuhan riil operasional sekolah, agar ketentuan dalam penggunaan dana BOS dapat lebih mendekati kebutuhan masing-masing sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adam, Kuper & Yessica, 2000, *"Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial"*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Alwasilah, Ahmad. 2002. *Pokoknya Kualitatif ; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Berry, David, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Penaku, Jakarta.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi Aksara.
- _____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta Rineka Cipta
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bndung, PT Refika Aditama.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.

Internet:

- <https://www.google.co.id/dikases> tanggal 30 Maret 2016
- <http://digilib.uinsby.ac.id/11064/4/bab%202.pdf> dikases tanggal 30 Maret 2016

Dokumentasi:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Bantuan Operasional Sekolah